

GLOBALISASI EKONOMI DAN IMPLIKASINYA BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG : TELAAH PENDEKATAN EKONOMI ISLAM

Akhmad Nur Zaroni

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda

a.zaroni@yahoo.com

ABSTRACT

Economic globalization is the increasing economic integration and interdependence of national, regional and local economies across the world through an intensification of cross-border movement of goods, services, technologies and capital. Globalization leads to freer trade between countries. This is one of its largest benefits to developing nations. Homegrown industries see trade barriers fall and have access to a much wider international market. While an influx of foreign companies and foreign capital creates a reduction in overall unemployment and poverty, it can also increase the wage gap between those who are educated and those who are not. Over the longer term, education levels will rise as the financial health of developing countries rise, but in the short term, some of the poor will become poorer. Not everyone will participate in an elevation of living standards. According to Islamic economics, economic globalization should be done using appropriate approaches so as not to cause a lot of problems that could potentially harm the countries that are developing. The approach used should be based on fairness and equality in human interaction, and a multidisciplinary approach that covers all aspects of human life, moral, intellectual, social, historical, demographic, and political.

Keywords: *Economic Globalization, Islamic Economics, Developing Countries.*

PENDAHULUAN

Sejak pertama kali ilmu ekonomi diakui sebagai cabang ilmu tersendiri dengan munculnya buku yang sangat terkenal "*The Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*" (1776) oleh Adam Smith, persoalan pembangunan ekonomi, belum banyak dibicarakan. Masalah ini baru aktual setelah perang dunia kedua (PD II), (Arsyad, 1999: 4). Saat itu negara-negara yang baru merdeka berusaha mengejar ketertinggalannya, sehingga muncullah

ekonomi pembangunan yang selanjutnya selalu dihubungkan dengan negara-negara baru merdeka atau negara-negara sedang berkembang (NSB) atau juga disebut negara-negara dunia ketiga (Gilarso, 1992:428).

Usaha NSB ini ternyata mendapat perhatian besar dari negara dunia pertama dengan memberikan bantuan-bantuan, baik berupa hibah (*grant*) maupun pinjaman lunak atau dalam bentuk bantuan teknik dan tenaga ahli, bahkan bantuan untuk melakukan studi

kelayakan suatu proyek. Hal ini semakin gencar, apalagi ketika ada kepentingan untuk mendapat dukungan dalam perang ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur. Sehingga, muncullah faham *developmentalisme* yang dikomandani oleh Amerika Serikat (Wahid, 1999: 20-22). Maka disusunlah sebuah strategi yang menciptakan konstruksi tatanan dunia pasca perang yang terpusat di Amerika Serikat, yaitu penerapan sistem *Bretton Woods* yang menyediakan kerangka institusional bagi sebuah tatanan ekonomi liberal yang diinginkan, dan *Marshall Plan* yang memberikan kemungkinan bagi mereka untuk mengelola perekonomian dunia pasca perang pada basis komitmen bersama bagi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tinggi, sebuah komitmen dari hasil hubungan negara masyarakat neo-liberal khas AS (Cholis, 1999:72). Dominasi ini dipandang oleh para ilmuwan sosial sebagai fondasi hegemoni Amerika atas sekutunya di Eropa, yang selanjutnya digunakan untuk memperluas hegemoninya ke negara-negara dunia ketiga.

Tidak heran kalau dalam sejarah pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga diwarnai dengan teori-teori Barat. Seperti teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi (*The Stages of Economic Growth Theories*) yang bertumpu pada asumsi-asumsi ekonomi neo-klasik, teori internasionalis-struktural (*The Sstructural Internationalist Theories*) (Todaro, 1977: 87), dan teori keterbelakangan dan ketergantungan *Marxis* dan *Neo-Marxis* (*Underdeveloped and Dependencia*) (Clements, 1999: 59).

Berbagai macam teori yang dipakai ternyata belum mampu mengakhiri keterbelakangan negara-

negara Dunia Ketiga. Masalah-masalah pembangunan seperti kemiskinan dan kepincangan distribusi pendapatan terus berlangsung memburuk. Kenyataan ini menyebabkan munculnya isu-isu kontroversial dalam ekonomi pembangunan yang secara umum mencerminkan ketidakpastian politik dan ekonomi tentang penerimaan politis teori-teori dalam pemecahan mendasar seperti penambahan angka pengangguran produktif, penghapusan kemiskinan pedesaan dan urban, serta penurunan ketimpangan ekonomi dan sosial. Kontroversi ini semakin ruwet ketika ada campur tangan kepentingan-kepentingan tertentu dari badan-badan penyandang dana kuat seperti Bank Dunia (IBRD), IMF, ADB, dan berbagai badan pembangunan PBB (Clements, 1999: 10).

Kenyataan di atas memunculkan asumsi bahwa kegagalan pembangunan di Dunia Ketiga adalah karena diterapkannya teori yang tidak sesuai dengan kondisi setempat (*a-historis*). Banyak pengambil keputusan di Dunia Ketiga terpaksa membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan ideologi-ideologi yang sama sekali tidak sesuai dan dimodifikasi sekadar sesuai dengan kondisi historis dan kultural setempat sehingga menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang merusak terhadap kondisi sosio-ekonomi yang ada (Clements, 1999: 11).

Ketika Negara miskin me-liberalkan pasar mereka, Negara kaya tetap secara tegas bersikap proteksionis, terutama di bidang seperti tekstil, pertanian, dan petrokimia, maka ketimpangan pendapatan terus meningkat di antara Negara kaya dan miskin. Ini adalah akibat dari globalisasi terhadap Negara miskin yang sebenarnya

banyak ditentang keras oleh NSB. Hal ini dapat dilihat pada kegagalan pertemuan WTO di Seattle tahun 1999, dan protes keras pada pertemuan IMF/World Bank di Prague, September 2000, serta pertemuan G8 di Genoa, Juli 2001. Para ahli ekonom berpendapat bahwa kacaunya pertemuan di Seattle bukanlah sekedar karena adanya ribuan demonstran yang tidak puas, melainkan terjadi karena kegagalan atas Amerika dan Eropa dalam merespons masalah dari Negara berkembang. Ketidaksetaraan yang berkembang akan menimbulkan resiko terbesar untuk masa depan dari ekonomi dunia. Jika kondisi tidak adil antara Negara-negara maju dengan NSB ini terus berlanjut, maka tujuan globalisasi akan semakin jauh dari kata sukses. Sistem yang adil dalam mengakses pasar oleh NSB adalah sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang mendasar. Ini adalah pesan yang sama yang ilmuwan Muslim selalu berikan sepanjang abad melalui penekanan tegas terhadap keadilan.

PEMBAHASAN

Pengertian Globalisasi Ekonomi

Tidak ada definisi yang baku atau standar mengenai globalisasi, tetapi secara sederhana globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana semakin banyak negara yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dunia. Jadi, jika pada periode sejak perang dunia kedua berakhir hingga tahun 1970-an ekonomi dunia didominasi oleh ekonomi Amerika Serikat (AS), sekarang ini walaupun produk domestik bruto (PDB) AS masih besar yakni sekitar 45% dari PDB dunia, peran dari ekonomi Uni Eropa, Jepang dan negara-

negara yang tergolong dalam *newly industrialized countries* (NICs), seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, dan Cina jauh lebih kuat sebagai motor penggerak perekonomian dunia. Semakin mengglobalnya suatu negara di dalam perekonomian dunia dapat dilihat dari misalnya peningkatan dari perdagangan internasionalnya (ekspor dan impor) yang tercerminkan antara lain pada peningkatan pangsa ekspornya di pasar global dan peningkatan rasio impor terhadap PDB-nya; semakin aktif terlibat dalam proses produksi yang melibatkan banyak negara (misalnya dalam membuat pesawat Boeing lebih dari 50 negara terlibat yang masing-masing membuat bagian-bagian tertentu dari pesawat tersebut, atau dalam membuat pesawat Airbus, sejumlah negara Eropa terlibat dalam proses pembuatannya), dan semakin besar arus investasi asing yang masuk ke negara tersebut atau semakin besarnya investasi dari negara tersebut ke negara-negara lain.

Jadi, proses globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan di dalam perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin pesat mengikuti kemajuan teknologi yang juga prosesnya semakin cepat. Perkembangan ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan juga mempertajam persaingan antarnegara, tidak hanya dalam perdagangan internasional tetapi juga dalam kegiatan investasi, finansial dan produksi.

Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi “satu” proses yang

melibatkan banyak negara. Dalam tingkat globalisasi yang optimal arus produk dan faktor-faktor produksi lintas negara atau regional akan selancar lintas kota di suatu negara atau desa di dalam suatu kecamatan. Pada tingkat ini, seorang pengusaha yang punya pabrik di Kalimantan Barat setiap saat bisa memindahkan usahanya ke Serawak atau Filipina tanpa ada halangan, baik halangan logistik maupun halangan birokrasi dari pihak pemerintah Malaysia atau Filipina maupun dari pemerintah Indonesia dalam urusan administrasi seperti izin dan sebagainya.

Sekarang ini tidak relevan lagi mencantumkan nama negara asal dari suatu produk; orang hanya tahu bahwa lampu itu adalah buatan Philips yang pabrik pembuatannya bukan di Belanda, tetapi misalnya di Tangerang. Banyak produk dari Disney bukan buatan AS melainkan dibuat di Cina dengan memakai tenaga kerja, bahan baku dan modal dari negara tersebut. Sekarang ini semakin banyak produk-produk yang komponennya di buat di lebih dari satu negara (seperti komputer, mobil, pesawat terbang, dll.), dan banyak perusahaan-perusahaan multinasional mempunyai kantor pusat bukan di negara asal melainkan di pusat-pusat keuangan di negara-negara lain seperti London dan New York.

Semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi secara nasional maupun regional disebabkan oleh banyak hal, diantaranya menurut Halwani (2002) adalah komunikasi dan transportasi yang semakin canggih dan murah, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara yang semakin terbuka, penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, metode

produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien, dan semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seantero dunia. Selain itu, penyebab-penyebab lainnya adalah semakin banyaknya industri yang bersifat *footloose* akibat kemajuan teknologi (yang mengurangi pemakaian sumber daya alam), semakin tingginya pendapatan dunia rata-rata per kapita, semakin majunya tingkat pendidikan masyarakat dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang, dan semakin banyaknya jumlah penduduk dunia.

Menurut Friedman (2002), globalisasi mempunyai tiga dimensi. Pertama, dimensi ide atau ideologi yaitu “kapitalisme”. Dalam pengertian ini termasuk seperangkat nilai yang menyertainya, yakni falsafah individualisme, demokrasi dan HAM. Kedua, dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas yang artinya arus barang dan jasa antarnegara tidak dihalangi sedikitpun juga. Ketiga, dimensi teknologi, khususnya teknologi informasi yang akan membuka batas-batas negara sehingga negara makin tanpa batas.

Ruang Lingkup Globalisasi Ekonomi

Dalam ekonomi, secara garis besar fenomena globalisasi dapat dilihat dari pertumbuhan kegiatan ekonomi lintas negara dalam berbagai bentuk. Diantaranya, dua bentuk kegiatan ekonomi yang secara nyata semakin mengglobal, yakni arus perdagangan dan arus modal internasional. Oleh sebab itu, arus globalisasi dan arus perdagangan serta investasi dunia berlangsung bersamaan.

Arus Perdagangan Internasional Pangsa dari pengeluaran konsumsi domestik terhadap barang dan jasa yang

diimpor dari negara-negara lain meningkat, dan bagian dari produksi barang dan jasa di dalam negeri yang diekspor meningkat. Peningkatan ini membuat volume perdagangan antarnegara di dunia meningkat, baik secara absolut maupun relatif, yakni rasio dari perdagangan internasional (ekspor dan impor) terhadap PDB dari masing-masing negara secara individu atau dunia. Data dari Bank Dunia tahun 2000 misalnya menunjukkan bahwa di dalam kelompok negara-negara kaya/maju, pangsa dari perdagangan internasional di dalam output total naik dari 27% ke 39% selama periode 1987-1998. Sedangkan di dalam kelompok negara-negara sedang berkembang, rasio perdagangan internasional terhadap PDB naik dari 10% ke 17% dalam periode yang sama (Bank Dunia, 2000a).

1. Arus Modal Internasional

Arus modal internasional atau arus modal antarnegara terdiri dari modal swasta dan modal pemerintah. Arus modal swasta antarnegara bisa berbentuk investasi atau pinjaman; sedangkan arus modal asing pemerintah pada umumnya dalam bentuk pinjaman, misalnya pinjaman yang diterima dari pemerintah dari negara-negara yang tergabung dalam CGI (Consultancy Group on Indonesia) atau dalam konteks bilateral dengan pemerintah negara-negara donor secara individual. Pengertian dari modal asing pemerintah juga termasuk pinjaman dari badan-badan dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Arus modal asing dalam bentuk investasi bisa investasi langsung atau jangka panjang, yang disebut *foreign direct investment* (FDI) atau penanaman modal asing (PMA),

atau investasi tidak langsung atau jangka pendek, yang umum disebut investasi portofolio. Dalam hal PMA, dalam dua dekade belakangan ini semakin banyak perusahaan-perusahaan yang berbasis di suatu negara melakukan investasi jangka panjang di negara-negara lain, yang dilandasi oleh berbagai motivasi seperti pasar yang luas dan ketersediaan sumber daya produksi di negara-negara tujuan investasi. Perkembangan ini dengan sendirinya meningkatkan arus PMA antarnegara, yang terefleksi dalam peningkatan pangsa dari PMA sebagai suatu persentase dari investasi total dunia.

Menurut data Bank Dunia pada tahun 1975 PMA berjumlah hanya 23 miliar dollar AS, dan pada tahun 1997 jumlahnya meningkat menjadi 644 miliar dollar AS (Friedman, 2002). Juga data Bank Dunia menunjukkan bahwa pada tahun 1998 jumlah investasi langsung dari perusahaan-perusahaan AS di banyak negara lain di dunia telah mencapai 133 miliar dollar AS, sedangkan PMA di AS pada tahun yang sama bernilai 193 miliar dollar AS. Secara keseluruhan, arus PMA di dunia meningkat sangat signifikan selama periode 1988-1998 dari 192 miliar dollar AS ke 610 miliar dollar AS. Arus PMA dari kelompok negara-negara maju ke kelompok negara-negara sedang berkembang juga meningkat tajam selama periode yang sama, termasuk Indonesia, terkecuali sejak krisis ekonomi arus PMA neto ke Indonesia mengalami suatu penurunan (Bank Dunia 2000b).

Dalam hal investasi jangka pendek, juga dalam dua dekade belakangan ini semakin banyak penabung-penabung, terutama di negara-negara maju yang mendiversifikasikan

portofolio mereka ke berbagai macam aset-aset keuangan luar negeri seperti obligasi, saham, pinjaman atau deposito). Juga semakin banyak perusahaan-perusahaan terutama di negara-negara sedang berkembang yang membiayai kegiatan produksi mereka dengan memakai dana investasi dari sumber-sumber luar negeri, selain dari kredit perbankan dan pasar modal domestik.

Akar Historis Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi

Sejarah Neo-Liberal bisa dirunut jauh ke masa-masa tahun 1930-an. Adalah riedrich von Hayek(1899-1992) yang bisa disebut sebagai Bapak Neo-Liberal. Hayek terkenal juga dengan julukan ekonom ultra-liberal. Muridnya yang utama adalah Milton Friedman, pencetus monetarisme. Pada saat itu adalah juga masa kejayaan Keynesianisme, sebuah aliran ilmu ekonomi oleh John Maynard Keynes. Keynesian dianggap berjasa dalam memecahkan masalah Depresi besar tahun 1929-1930. Terutama setelah diadopsi oleh Presiden Roosevelt dengan program "*New-Deal*" maupun Marshall Plan untuk membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia ke-II, maka Keynesian resmi menjadi mainstream ekonomi. Bahkan Bank Dunia dan IMF kala itu terkenal sebagai si kembar Keynesianis, karena mempraktekkan semua resep Keynesian. Dasar pokok dari ajaran Keynes adalah kepercayaannya pada intervensi negara ke dalam kehidupan ekonomi. Menurutnya, kebijakan ekonomi haruslah mengikis pengangguran sehingga tercipta tenaga kerja penuh (*full employment*) serta adanya pemerataan yang lebih besar. Dalam bukunya yang

terkenal di tahun 1926 berjudul "*The End of Laissez-Faire*", Keynes menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kepentingan individual yang selalu tidak sejalan dengan kepentingan umum. Katanya, "Sama sekali tidak akurat untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip ekonomi politik, bahwa kepentingan perorangan yang paling pintar sekalipun akan selalu bersesuaian dengan kepentingan umum". Keynesianisme masih tetap menjadi *dominant economy* sampai tahun 1970-an.

Sementara itu neo-liberal belum lagi bernama. Akan tetapi Hayek dan kawan-kawan sudah merasa gelisah dengan mekarnya paham Keynes ini. Pada masa itu pandangan semacam neoliberal sama sekali tidak populer. Meskipun begitu mereka membangun basis di tiga universitas utama: *London School of Economics* (LSE), Universitas Chicago, dan *Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales* (IUHEI) di Jenewa.

Para ekonom kanan inilah yang kemudian setelah PD-II mendirikan lembaga pencetus neo-Liberal, yaitu *Societe du Mont-Pelerin*, Pertemuan mereka yang pertama di bulan April 1947 dihadiri oleh 36 orang dan didanai oleh bankir-bankir Swiss. Termasuk hadir adalah Karl Popper dan Maurice Allais, serta tiga penerbitan terkemuka, *Fortune*, *Newsweek* dan *Reader's Digest*. Lembaga ini merupakan "semacam *freemasonry* neoliberal, sangat terorganisir baik dan berkehendak untuk menyebarluaskan kredo kaum neo-liberal, lewat pertemuan-pertemuan internasional secara reguler". Pandangan Neo-Liberal dapat diamati dari pikiran Hayek. Bukunya yang terkenal adalah "*The Road to Serfdom*" (Jalan ke

Perbudakan) yang menyerang keras Keynes. Buku tersebut kemudian menjadi kitab suci kaum kanan dan diterbitkan di *Reader's Digest* di tahun 1945. Ada kalimat di dalam buku tersebut: "Pada masa lalu, penundukan manusia kepada kekuatan impersonal pasar, merupakan jalan bagi berkembangnya peradaban, sesuatu yang tidak mungkin terjadi tanpa itu. Dengan melalui ketertundukan itu maka kita bisa ikut serta setiap harinya dalam membangun sesuatu yang lebih besar dari apa yang belum sepenuhnya kita pahami". Neo-liberal menginginkan suatu sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad-19, di mana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Regulator utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah. Mekanisme pasar akan diatur oleh persepsi individu, dan pengetahuan para individu akan dapat memecahkan kompleksitas dan ketidakpastian ekonomi, sehingga mekanisme pasar dapat menjadi alat juga untuk memecahkan masalah sosial.

Menurut mereka, pengetahuan para individu untuk memecahkan persoalan masyarakat tidak perlu disalurkan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam arti ini maka Neo-liberal juga tidak percaya pada Serikat Buruh atau organisasi masyarakat lainnya. Dengan demikian Neo-liberal secara politik terus terang membela politik otoriter. Ini ditunjukkan oleh Hayek ketika mengomentari rejim Pinochet di Chili, "Seorang diktator dapat saja berkuasa secara liberal, sama seperti mungkin demokrasi berkuasa tanpa liberalisme. Preferensi personal saya adalah memilih sebuah kediktatoran

liberal ketimbang memilih pemerintahan demokratis yang tidak punya liberalisme".

Demokrasi politik, menurut neo-Liberal, dengan demikian adalah sistem politik yang menjamin terlaksananya kebebasan individu dalam melakukan pilihan dalam transaksi pasar, bukan sistem politik yang menjamin aspirasi yang pluralistik serta partisipasi luas anggota masyarakat. Bahkan salah seorang pentolan neo-Liberal, William Niskanen, menyatakan bahwa suatu pemerintah yang terlampau banyak mengutamakan kepentingan rakyat banyak adalah pemerintah yang tidak diinginkan dan tidak akan stabil. Bila terjadi konflik antara demokrasi dengan pengembangan usaha yang kapitalistis, maka mereka memilih untuk mengorbankan demokrasi.

Salah satu benteng neo-liberal adalah Universitas Chicago, di mana Hayek mengajar di situ antara tahun 1950 sampai 1961, dan Friedman menghabiskan seluruh karir akademisnya. Karena itu mereka juga terkenal sebagai "*Chicago School*". Buku Friedman adalah "*The Counter Revolution in Monetary Theory*", yang menurutnya telah dapat menyingkap hukum moneter yang telah diamatinya dalam berabad-abad dan dapat dibandingkan dengan hukum ilmu alam. Friedman percaya pada *freedom of choice* (kebebasan memilih) individual yang ekstrim. Dengan demikian, neo-Liberal tidak mempersoalkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Pertumbuhan konglomerasi dan bentuk-bentuk unit usaha besar lainnya semata-mata dianggap sebagai manifestasi dari kegiatan individu atas dasar kebebasan memilih dan persaingan bebas. Efek

sosial yang ditimbulkan oleh kekuasaan ekonomi pada segelintir kelompok kuat tidak dipersoalkan oleh neo-Liberal. Karenanya demokrasi ekonomi tidak ada di dalam agenda kaum neo-Liberal (Arif, 1998: 39).

Pandangan kaum neo-Liberal pada dasarnya tidak populer di masyarakat Barat. Mereka anti terhadap *welfare state* (negara kesejahteraan) dan mereka juga anti demokrasi. Tetapi mengapa mereka bisa berjaya sekarang? Susan George menjawabnya, bahwa mereka berasal dari sebuah kelompok kecil rahasia dan mereka sangat percaya pada doktrin tersebut, yang kemudian dengan bantuan para pendananya, membangun jaringan yayasan-yayasan internasional yang besar, lembaga-lembaga, pusat-pusat riset, berbagai publikasi, para akademisi, para penulis, serta humas yang mengembangkan, mengemas dan mempromosikan ide dan doktrin tersebut tanpa henti. Kata Susan, “mereka membangun kader-kader ideologis yang luar biasa efisiennya karena mereka memahami apa yang disampaikan oleh pemikir marxis Itali Antonio Gramsci ketika ia berbicara tentang konsep hegemoni kultural. Bila kamu dapat menguasai kepala orang, maka hati dan tangan mereka akan ikut” (George, 2000: 29).

Salah seorang yang menjadi ujung tombaknya adalah Anthony Fisher, seorang pengusaha sukses yang kemudian mendirikan *Institute of Economic Affairs* (IEA) pada tahun 1955 dengan bantuan dana dari kaum industrialis lainnya. Tujuan lembaga ini adalah “menyebarkan pemikiran ekonomi yang kuat di berbagai universitas dan berbagai lembaga pendidikan mapan lainnya”. IEA inilah yang kemudian memberi pengaruh besar

kepada Margaret Thatcher, seperti dikatakan Milton Friedman, “Tanpa adanya IEA, maka saya meragukan akan bisa terjadi revolusi Thatcherite”. Salah satu koran yang menjadi corong neo-Liberal di Inggris adalah *The Daily Telegraph*. Lembaga lain juga didirikan, yaitu *Centre for Policy Studies* (CPS) di tahun 1974 yang sangat berpengaruh kepada para politisi di Inggris. IEA kemudian melahirkan *Adam Smith Institute* (ASI) di tahun 1976. Kerjasama mereka dengan *Heritage Foundation*, didirikan di Washington tahun 1973 oleh lulusan LSE, adalah “guna membuat hal yang sama bagi politik Amerika sebagaimana yang dilakukan oleh CPS kepada politik Inggris”. Anthony Fisher kemudian menjadi presiden pertama dari lembaga *Fraser Institute* di Kanada di tahun 1974. Di tahun 1977, ia mendirikan *International Centre for Economic Policy Studies* di New York, di mana salah satu pendirinya adalah Bill Casey, yang kemudian menjadi Direktur CIA. Tahun 1979, Fisher mendirikan *Institute for Public Policy* di San Francisco. Fisher juga terlibat dalam mendirikan *Centre for International Studies* (CIS) di Australia, di mana Direktornya Greg Lindsay merupakan kontributor penting berkembangnya ide pasar bebas di politik Australia. Dalam rangka memudahkan mengelola berbagai lembaga tersebut, Fisher mendirikan *Atlas Economic Research Foundation* yang menyediakan struktur kelembagaan pusat, yang di tahun 1991 mengklaim membantu, mendirikan, membiayai sekitar 78 lembaga serta mempunyai hubungan dengan 81 lembaga lainnya di 51 negara. Ketika tembok Berlin rubuh, maka banyak personelnnya yang pindah ke Eropa Timur guna “merubah

ekonomi-ekonomi yang sakit menjadi kapitalisme” (Wheelwright, 1998: 12)

Para ekonom neo-Liberal di tahun 1970-an berhasil menembus dominasi ilmu ekonomi. Di tahun 1974, Hayek dianugerahi Nobel Ekonomi. Sesudahnya Friedman mendapat Nobel Ekonomi di tahun 1976. Juga Maurice Allais, seorang anggota Mont-Pelerin Society, mendapat Nobel Ekonomi di tahun 1988. Sejak tahun 1970-an, neo-Liberal mulai berkibar. Sejak itu pulalah seluruh paradigma ekonomi secara perlahan masuk ke dalam cara berpikir neo-Liberal, termasuk ke dalam badan-badan multilateral, Bank Dunia, IMF dan GATT (kemudian menjadi WTO). Dengan demikian Margaret Thatcher menjadi pengikut dari Hayek, sedangkan murid dari Friedman adalah Ronald Reagan. Inilah yang menghantar neo-Liberal menjadi ekonomi mainstream di tahun 1980-an lewat *Thatcherism* dan *Reaganomics*.

Thatcher sebenarnya adalah seorang *social-darwinist*, sampai akhirnya ia menemukan buku Hayek, dan kemudian menjadi salah satu pengikutnya. Doktrin pokok dari Thatcher adalah paham kompetisi – kompetisi di antara negara, di antara wilayah, di antara perusahaan-perusahaan, dan tentunya di antara individu. Kompetisi adalah keutamaan, dan karena itu hasilnya tidak mungkin jelek. Karena itu kompetisi dalam pasar bebas pasti baik dan bijaksana. Kata Thatcher suatu kali, “Adalah tugas kita untuk terus mempercayai ketidakmerataan, dan melihat bahwa bakat dan kemampuan diberikan jalan keluar dan ekspresi bagi kemanfaatan kita bersama”. Artinya, tidak perlu khawatir ada yang tertinggal dalam persaingan kompetitif, karena

ketidaksamaan adalah sesuatu yang alamiah. Akan tetapi ini baik karena berarti yang terhebat, terpandai, terkuat yang akan memberi manfaat pada semua orang. Hasilnya, di Inggris sebelum Thatcher, satu dari sepuluh orang dianggap hidup di bawah kemiskinan. Kini, satu dari empat orang dianggap miskin; dan satu anak dari tiga anak dianggap miskin.

Thatcher juga menggunakan privatisasi untuk memperlemah kekuatan Serikat Buruh. Dengan privatisasi atas sektor publik, maka Thatcher sekaligus memperlemah Serikat-Serikat Buruh di BUMN yang merupakan terkuat di Inggris. Dari tahun 1979 sampai 1994, maka jumlah pekerja dikurangi dari 7 juta orang menjadi 5 juta orang (pengurangan sebesar 29%). Pemerintah juga menggunakan uang masyarakat (para pembayar pajak) untuk menghapus hutang dan merekapitalisasi BUMN sebelum dilempar ke pasar. Contohnya Perusahaan Air Minum (PAM) mendapat pengurangan hutang 5 milyar pounds ditambah 1,6 milyar pounds dana untuk membuatnya menarik sebelum dibeli pihak swasta. Demikian pula di Amerika, kebijakan neo-Liberal Reagan telah membawa Amerika menjadi masyarakat yang sangat timpang. Selama dekade 1980an, 10% teratas meningkat pendapatannya 16%; 5% teratas meningkat pendapatannya 23%; dan 1% teratas meningkat pendapatannya sebesar 50%. Ini berkebalikan dengan 80% terbawah yang kehilangan pendapatan; terutama 10% terbawah, jatuh ke titik nadir, kehilangan pendapatan 15% (George, 2000: 29).

Sejak 1980-an pula, bersamaan dengan krisis hutang Dunia Ketiga, maka paham neo-Liberal menjadi paham kebijakan badan-badan dunia

multilateral Bank Dunia, IMF dan WTO. Tiga poin dasar neo-Liberal dalam multilateral ini adalah: pasar bebas dalam barang dan jasa; perputaran modal yang bebas; dan kebebasan investasi. Sejak itu Kredo neo-Liberal telah memenuhi pola pikir para ekonom di negara-negara tersebut. Kini para ekonom selalu memakai pikiran yang standard dari neo-Liberal, yaitu deregulasi, liberalisasi, privatisasi dan segala jampi-jampi lainnya. Kaum mafia Berkeley UI yang dulu neo-klasik, kini juga berpindah paham menjadi neo-liberal. Poin-poin pokok neo-Liberal dapat disarikan sebagai berikut (Martinez, 1998: 8):

1. Aturan Pasar. Membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga. Sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa.
2. Memotong Pengeluaran Publik dalam Hal Pelayanan Sosial. Ini seperti terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk 'jaring pengaman' untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih – ini juga guna mengurangi peran pemerintah. Di lain pihak mereka tidak menentang adanya subsidi dan manfaat pajak (*tax benefits*) untuk kalangan bisnis.
3. Deregulasi. Mengurangi peraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha.
4. Privatisasi. Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor

swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak.

Menghapus Konsep Barang-Barang Publik atau Komunitas. Menggantinya dengan "tanggungjawab individual", yaitu menekankan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasannya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program di Bank Dunia dan IMF ini, maka program *neo-liberal*, mengambil bentuk sebagai berikut (Arif, 1998 : 360) :

Paket kebijakan *Structural Adjustment* (Penyesuaian Struktural), terdiri dari komponen-komponen: (a) Liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang bebas; (b) Devaluasi; (c) Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga *public utilities*, dan penekanan untuk tidak menaikkan upah dan gaji.

Paket kebijakan deregulasi, yaitu: (a) intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan karena dianggap telah mendistorsi pasar; (b) privatisasi yang seluas-luasnya dalam ekonomi sehingga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai negara; (c) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis proteksi; (d) memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi

asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar.

1. Paket kebijakan yang direkomendasikan kepada beberapa negara Asia dalam menghadapi krisis ekonomi akibat anjloknya nilai tukar mata uang terhadap dollar AS, yang merupakan gabungan dua paket di atas ditambah tuntutan-tuntutan spesifik disana-sini. Di Indonesia, paham neo-liberal mulai terasa pengaruhnya di tahun 1980-an, ketika pemerintah mulai menerapkan kebijakan liberalisasi keuangan dan ekonomi, yang berujung dalam berbagai paket deregulasi semenjak tahun 1983. Paralel dengan masa itu adalah terjadinya krisis hutang dunia Ketiga di tahun 1982, ketika Mexico *default* (menyatakan tidak mampu membayar hutangnya). Setelah itu Bank Dunia dan IMF masuk ke dalam perekonomian negara-negara yang terkena krisis hutang lewat perangkat SAP. Saat itu terutama di negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Indonesia belumlah terkena krisis, dan karenanya jauh dari hiruk-pikuk SAP. Akan tetapi sejak itu jelas pola pembangunan Indonesia mulai mengadopsi kebijakan neo-liberal, khususnya karena keterikatan Indonesia kepada IGGI, Bank Dunia dan IMF.

Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi di Negara-Negara Berkembang

Kebijakan ekonomi negara-negara berkembang telah berubah secara drastis sejak tahun 1980-an. Hampir semua negara berkembang menggeser kebijakan-kebijakan ekonomi mereka ke arah liberalisasi yang lebih besar pada mekanisme pasar melalui serangkaian reformasi ekonomi berorientasi pasar.

Nyaris di segala penjuru dunia, negara-negara berkembang mulai mengadopsi kebijakan-kebijakan yang

dimaksudkan untuk merestrukturisasi watak peran negara dalam perekonomian untuk meliberalisasi perdagangan domestik dan regulasi investasi untuk menswastakan perusahaan-perusahaan milik negara. Berbagai reformasi kebijakan tersebut nyaris mengganti secara keseluruhan semua kebijakan sebelumnya yang mendominasi negara-negara berkembang. Reformasi yang mengenyahkan nasionalis-ekonomi dari perbendaharaan kata negara-negara itu, mengurangi peran eksekutif negara dalam perekonomian dan menghentikan kecenderungan pada pembangunan jenis sosialis. Orientasi mutakhir pembangunan di negara-negara berkembang didasarkan pada premis kebijakan-kebijakan memandang keluar, dirancang untuk mengintegrasikan perekonomian ke dalam pasar global, utamanya ketika strategi-strategi berorientasi ekspor menggantikan industrialisasi substitusi impor (Sugiono, 1999 : xi).

Keberpihakan kepada ideologi pasar ini telah dijelaskan oleh M. Friedman:

Tampak jelas bahwa, paling tidak hingga saat ini, sebuah pasar bebas tanpa perencanaan terpusat telah menjadi bukan hanya jalan pertumbuhan ekonomi yang paling efektif, bahkan satu-satunya jalan yang efektif untuk meningkatkan standar hidup rakyat banyak. dan sangat jelas pula bahwa cara ini telah menjadi satu-satunya jalan yang cocok dengan kebebasan politik dan demokrasi (Friedman, 1970:73).

Kebangkitan kembali secara menyeluruh kepentingan politik praktis teori Neo-Klasik bermula dari jawaban bernada ortodoks/konservatif yang diajukan oleh teori ini untuk

menanggulangi krisis ekonomi yang tidak mampu diselesaikan oleh usulan-usulan kontradiktif teori Keynesian (Clements, 1999: 22). Di samping itu juga runtuhnya sistem ekonomi yang direndahkan secara terpusat di Uni Soviet dan negara-negara Eropa timur lainnya, secara dramatis menunjukkan kegagalan sistem ekonomi yang di dasarkan pada pengendalian oleh pemerintah secara terpusat (Mangkusuwondo, 1987:158). Maka tidak heran kalau kesalahan-kesalahan dilemparkan pada strategi sosialis mengenai pemerintahan yang besar dan rencana pembangunan menyeluruh yang dianutnya selama masa kurang lebih tiga dekade.

Telah dikatakan bahwa bersandar pada investasi sektor publik dan kontrol untuk meningkatkan pertumbuhan telah menimbulkan bukan saja penyelewengan pada alokasi sumber-sumber, melainkan juga pada ketidakseimbangan makroekonomi dan eksternal. Hal ini telah merintang realisasi inisiatif dan potensi investasi bagi sektor swasta. Antusiasme terhadap industri-industri berat yang padat modal dan berskala besar telah menimbulkan industrialisasi yang tidak efisien yang merugikan pembangunan pedesaan dan pertanian sebagaimana ditekankan oleh Michael Camdessus :

Ekonomi yang mengalami inflasi terus-menerus defisit anggaran yang tinggi, pembatasan perdagangan yang besar, salah menetapkan kurs, suku bunga yang tidak realistis, hutang eksternal yang besar, dan larinya modal tidak sehat yang terus-menerus adalah tidak dapat dan tidak tumbuh cepat dalam masa yang panjang (Chapra, 1992: 167).

Implikasi Globalisasi Ekonomi

Menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antar Negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing Negara melalui spesialisasi produksi komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing Negara itu. Namun dalam kenyataannya tidaklah serta merta teori itu menciptakan kemakmuran bagi Negara-negara yang terlibat. Dampak dari globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu negara bisa positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut. Secara umum, ada empat (4) wilayah yang pasti akan terpengaruh, yakni :

Ekspor. Dampak positifnya adalah ekspor atau pangsa pasar dunia dari suatu negara meningkat; sedangkan efek negatifnya adalah kebalikannya: suatu negara kehilangan pangsa pasar dunianya yang selanjutnya berdampak negatif terhadap volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan PDB serta meningkatkan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Dalam beberapa tahun belakangan ini ada kecenderungan bahwa peringkat Indonesia di pasar dunia untuk sejumlah produk tertentu yang selama ini diunggulkan Indonesia, baik barang-barang manufaktur seperti tekstil, pakaian jadi dan sepatu, maupun pertanian (termasuk perkebunan) seperti kopi, coklat dan biji-bijian, terus menurun relatif dibandingkan misalnya Cina dan Vietnam. Ini tentu suatu pertanda buruk yang perlu segera ditanggapi serius oleh dunia usaha dan pemerintah Indonesia. Jika tidak, bukan suatu yang mustahil bahwa pada suatu saat di masa depan Indonesia akan

tersepek dari pasar dunia untuk produk-produk tersebut.

1. Impor. Dampak negatifnya adalah peningkatan impor yang apabila tidak dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Dalam beberapa tahun belakangan ini ekspansi dari produk-produk Cina ke pasar domestik Indonesia, mulai dari kunci Inggris, jam tangan tiruan hingga sepeda motor, semakin besar. Ekspansi dari barang-barang Cina tersebut tidak hanya ke pertokoan-pertokoan moderen tetapi juga sudah masuk ke pasar-pasar rakyat dipinggir jalan.
2. Investasi. Liberalisasi pasar uang dunia yang membuat bebasnya arus modal antar negara juga sangat berpengaruh terhadap arus investasi neto ke Indonesia. Jika daya saing investasi Indonesia rendah, dalam arti iklim berinvestasi di dalam negeri tidak kondusif dibandingkan di negara-negara lain, maka bukan saja arus modal ke dalam negeri akan berkurang tetapi juga modal investasi domestik akan lari dari Indonesia yang pada akhirnya membuat saldo neraca modal di dalam neraca pembayaran Indonesia negatif. Pada gilirannya, kurangnya investasi juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan produksi dalam negeri dan ekspor. Seperti telah di bahas sebelumnya, sejak krisis ekonomi 1997/98, arus PMA ke Indonesia relatif berkurang dibandingkan ke negara-negara tetangga; bahkan di dalam kelompok ASEAN, Indonesia menjadi negara yang paling tidak menarik untuk PMA karena berbagai hal, mulai dari kondisi perburuan yang tidak lagi

menarik investor asing, masalah keamanan dan kepastian hukum, hingga kurangnya insentif, terutama insentif fiskal bagi investasi-investasi baru. Sebaliknya, Vietnam, sebagai suatu contoh, menjadi sangat menarik bagi investor asing karena tidak hanya tenaga kerjanya sangat disiplin dan murah, juga pemerintah Vietnam memberikan *tax holiday* bagi investasi-investasi baru.

Tenaga kerja. Dampak negatifnya adalah membanjirnya tenaga ahli dari luar, dan kalau kualitas SDM dalam negeri tidak segera ditingkatkan untuk dapat menyaingi kualitas SDM dari negara-negara lain, tidak mustahil pada suatu ketika pasar tenaga kerja atau peluang kesempatan kerja di dalam negeri sepenuhnya dikuasai oleh orang asing. Sementara itu, tenaga kerja Indonesia (TKI) semakin kalah bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara lain di luar negeri. Juga tidak mustahil pada suatu ketika TKI tidak lagi diterima di Malaysia, Singapura atau Taiwan dan digantikan oleh tenaga kerja dari negara-negara lain seperti Filipina, India dan Vietnam yang memiliki keahlian lebih tinggi dan tingkat kedisiplinan serta etos kerja yang lebih baik dibandingkan TKI.

Keempat implikasi tersebut secara bersamaan akan menciptakan suatu efek yang sangat besar dari globalisasi ekonomi dunia terhadap perekonomian dan kehidupan sosial di setiap negara yang ikut berpartisipasi di dalam prosesnya, termasuk Indonesia. Lebih banyak pihak yang berpendapat bahwa globalisasi ekonomi akan lebih merugikan daripada menguntungkan NSB. Seperti misalnya pendapat yang pesimis mengenai globalisasi dari Khor sebagai berikut: *Globalisasi adalah suatu proses yang sangat tidak adil dengan distribusi keuntungan maupun*

kerugian yang juga tidak adil. Ketidakseimbangan ini tentu saja akan menyebabkan pengkutuban antara segelintir negara dan kelompok yang memperoleh keuntungan, dan negara-negara maupun kelompok yang kalah atau termajinalisasi. Dengan demikian, globalisasi, pengkutuban, pemusatan kesejahteraan dan marjinalisasi merupakan rentetan peristiwa menjadi saling terkait melalui proses yang sama. Dalam proses ini, sumber-sumber investasi, pertumbuhan dan teknologi moderen terpusat pada sebagian kecil (terutama negara-negara Amerika Utara, Eropa, Jepang dan negara-negara industri baru (NICs) di Asia Timur). Majoritas NSB tidak tercakup dalam proses globalisasi atau ikut berpartisipasi namun dalam porsi yang sangat kecil dan acapkali berlawanan dengan kepentingannya, misalnya liberalisasi impor dapat menjadi ancaman bagi produsen-produsen domestik mereka dan liberalisasi moneter dapat menyebabkan instabilitas moneter dalam negeri (Khor, 2002: 18).

Masih menurut Khor, Manfaat dan biaya liberalisasi perdagangan bagi NSB menimbulkan persoalan yang kian kontroversial. Pandangan kontroversial bahwa liberalisasi perdagangan merupakan sesuatu yang penting dan secara otomatis atau pada umumnya memiliki dampak-dampak positif bagi pembangunan dipertanyakan kembali secara empiris maupun analitis. Kini saatnya meneliti sejarahnya dan merumuskan berbagai pendekatan yang tepat bagi kebijakan perdagangan di NSB (Khor, 2002: 32).

Dengan demikian, Khor berpendapat bahwa globalisasi ekonomi mempengaruhi berbagai kelompok negara secara berbeda. Secara umum,

menurutnya, dampak dari proses ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga grup negara.

Grup pertama adalah sejumlah kecil negara yang mempelopori atau yang terlibat secara penuh dalam proses ini mengalami pertumbuhan dan perluasan kegiatan ekonomi yang pesat, yang pada umumnya adalah negara-negara maju.

Grup kedua adalah negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sedang dan fluktuatif, yakni negara-negara yang berusaha menyesuaikan diri dengan kerangka globalisasi ekonomi atau liberalisasi perdagangan dan investasi. Misalnya negara-negara dari kelompok NSB yang tingkat pembangunan/kemajuan industrinya sudah mendekati tingkat dari negara-negara industri maju, seperti NICs.

Grup ketiga adalah negara-negara yang termajinalisasikan atau yang sangat dirugikan karena ketidakmampuan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut dan persoalan-persoalan pelik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan globalisasi ekonomi seperti harga-harga komoditas primer yang rendah dan fluktuatif serta hutang luar negeri. Grup ini didominasi oleh NSB terutama di Afrika, Asia Selatan (terkecuali India) dan beberapa negara di Amerika Latin (tidak termasuk negara-negara yang cukup berhasil seperti Brazil, Argentina, Chile dan Meksiko).

Perkiraan bahwa sebagian besar dari NSB, terutama di tiga wilayah tersebut di atas termajinalisasikan dalam proses globalisasi ekonomi bukan sesuatu tanpa alasan kuat. Data deret waktu dari UNCTAD menunjukkan bahwa dalam empat (4) dekade terakhir,

pangsa NSB di dalam ekspor dunia menurun secara konstan dari 3,06% pada tahun 1954 ke 0,42% pada tahun 1998. Laju penurunannya lebih dalam periode 1960-an dan 1970-an Data UNCTAD tidak hanya membedakan antara negara-negara maju (*developed countries*) dengan NSB, tetapi di dalam kelompok NSB itu sendiri dibedakan antara yang sudah maju (*developing countries*) seperti NICs, Thailand, Malaysia, Indonesia, India, Cina, Pakistan, Israel di Asia dan Brasil, Argentina, Chile dan Meksiko di Amerika Latin, dan negara-negara yang terbelakang dalam tingkat pembangunan/industrialisasinya (*least developed countries*) yang didominasi terutama oleh negara-negara miskin di Afrika dan Asia Selatan. NSB dari kategori *least developed countries* paling kecil pangsa pasar dunianya, dan dalam 4 dekade terakhir ini menunjukkan suatu tren yang menurun yang mengindikasikan bahwa kelompok ini semakin termarginalisasikan.

Sudah banyak laporan mengenai ketidakmerataan pendapatan antar negara yang dikaitkan dengan proses globalisasi ekonomi. Diantaranya adalah laporan pembangunan dan perdagangan dari UNCTAD tahun 1997. Di dalam laporan tersebut ditunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara NSB, khususnya dari kategori *least developed countries*, yang sering disebut negara-negara Selatan dengan negara-negara maju, atau negara-negara Utara (terutama negara-negara industri yang tergabung dalam kelompok G-7, yakni AS, Kanada, Australia, Perancis, Jerman, Inggris, dan Jepang) meningkat secara signifikan sejak awal tahun 1980-an. Pada tahun 1965 rata-rata pendapatan per kapita dari negara-negara G-7 tersebut mencapai 20 kali lebih tinggi

dari tujuh (7) negara termiskin di dunia; dan pada pertengahan dekade 90-an perbandingannya meningkat menjadi 39 kalinya. Menurut laporan tersebut, ketimpangan itu berakar pada seperangkat kekuatan yang ditimbulkan oleh pesatnya liberalisasi perdagangan dunia yang akhirnya mengarah pada semakin besarnya ketimpangan pendapatan karena hanya negara-negara yang lebih kuat atau lebih siap yang menikmati keuntungan dari era tersebut, sedangkan NSB yang pada umumnya masih sangat lemah dalam segala bidang terutama pendidikan dan teknologi adalah pihak yang dirugikan.

Di dalam laporan UNCTAD tahun 1999 dikatakan bahwa liberalisasi perdagangan dunia menyebabkan peningkatan yang tajam dalam impor NSB yang tidak diimbangi oleh peningkatan ekspor mereka dalam laju yang sama. Struktur dari pertumbuhan perdagangan luar negeri ini tidak saja membuat banyak NSB mengalami defisit yang besar dari saldo transaksi berjalan mereka, tetapi juga membuat tingkat ketergantungan NSB terhadap impor dari negara-negara Utara semakin tinggi. Terkecuali beberapa negara seperti Cina, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura yang pertumbuhan eksportnya rata-rata per tahun tinggi.

Gambaran yang sama juga dijumpai oleh Nayyar (1997) dari penelitiannya mengenai fenomena pembangunan yang tidak adil antara NSB dan negara-negara maju yang disebabkan oleh globalisasi ekonomi dunia. Menurut hasil studinya, keuntungan-keuntungan dari liberalisasi perdagangan menumpuk hanya di sebagian kecil NSB, yakni dari kategori *developing countries*.. Hanya terdapat sebelas (11) NSB yang menjadi bagian

integral dari globalisasi ekonomi di akhir abad ke-20. Negara-negara tersebut mencakup sekitar 60% dari total ekspor NSB di awal 1990-an, yang meningkat sekitar 100% dari 30% selama 1970-an; dan sekitar 66% dari PMA yang mengalir ke NSB pada tahun 1981-1991 (Nayyar, 1997).

Menurutnya, kelemahan dari NSB berakar dari sejumlah faktor. Posisi NSB secara ekonomi lemah untuk memulai integrasi dengan pasar dunia karena rendahnya kapasitas ekonomi dalam negeri dan infrastruktur sosial yang belum berkembang baik sebagai warisan masa penjajahan. Negara-negara tersebut yang sangat tergantung pada ekspor komoditi-komoditi primer semakin diperlemah oleh harga dunia dari komoditi-komoditi tersebut yang rendah dan berfluktuatif serta dasar tukar perdagangan (ToT) dari ekspor mereka yang terus menurun yang membuat negara-negara tersebut kekurangan devisa yang berbuntut pada krisis utang luar negeri. Perkembangan dari rasio antara indeks harga dari komoditi-komoditi primer (terdiri dari bahan-bahan makanan, bahan-bahan baku pertanian, karet, minyak dari tumbuh-tumbuhan termasuk dari kelapa sawit, rami, biji tambang dan logam) terhadap indeks harga dari produk-produk manufaktur (ToT) menunjukkan suatu tren yang menurun sejak awal 1970-an hingga akhir 1990-an.

Selain itu, Nayyar berpendapat bahwa kelemahan NSB juga dikarenakan lemahnya daya tawar dan kemampuan negosiasi mereka dalam hubungan internasional. Dengan jumlah utang luar negeri yang besar, dan tingginya ketergantungan mereka pada bantuan donor bilateral dan organisasi-organisasi dunia pemberi pinjaman multilateral

seperti Bank Dunia dan IMF, ditambah lagi dengan ketergantungan impor yang juga tinggi, NSB kehilangan kemampuan untuk bernegosiasi. Akhirnya, NSB hanya bisa menerima apa saja yang dituntut oleh negara-negara maju yang berkaitan dengan tata cara perdagangan internasional seperti penghapusan tarif impor dan subsidi ekspor terhadap komoditi-komoditi pertanian, yang bagi sebagian NSB masih merupakan komoditi-komoditi 'sensitif'.

Islam dan Globalisasi Ekonomi Globalisasi Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam globalisasi bukanlah hal baru. Pada zaman Rasulullah saw, globalisasi sudah terjadi, saat itu sudah menjadi hal yang biasa ketika Nabi maupun para sahabat melakukan perniagaan ke luar negeri seperti ke Mesir, Syam (Siria), Irak, Yunani, Turki, dan Spanyol. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang relevan dengan tema globalisasi, diantaranya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat (49):13).

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan(Q.S. Al-Qasas (28):77)

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui (Q.S. As-Saba' (34):28).

Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, (Q.S. Al-Furqan (25): 1).

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan bagaimana memaknai dan menghadapi globalisasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan terciptanya manusia dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dengan tujuan utama yaitu untuk saling mengenal. Kemudian, Islam mengajarkan untuk mencari kebahagiaan di dunia, yang menunjukkan peran manusia secara global dan jangan sampai merusak dunia tempat manusia hidup dan tinggal. Terakhir, Islam merupakan agama yang universal untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam.

Adapun diantara hadis Nabi yang relevan dengan globalisasi adalah: *"...tidak ada kelebihan bagi seorang arab atas non-arab (ajam) dan bagi orang non-arab atas orang arab dan yang berkulit merah atas yang berkulit hitam dan yang hitam atas yang merah, kecuali dengan ketakwaannya..." (HR. Ahmad).*

Hadist diatas mengandung arti bahwa globalisasi dalam Islam tidak mengenal diskriminasi, karena dalam Islam tidak ada kelebihan suatu suku

bangsa atas suku bangsa lainnya. Sehingga dalam berinteraksi secara global, khususnya dalam interaksi perdagangan internasional, Islam menganjurkan untuk tidak diskriminatif.

Globalisasi Ekonomi Yang Berkeadilan

Globalisasi ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat. Tanpa pendekatan yang tepat maka globalisasi ekonomi hanya akan menimbulkan banyak permasalahan yang cenderung merugikan, terutama bagi Negara-negara yang sedang berkembang. Pendekatan yang digunakan harus berbasis pada keadilan serta kesetaraan dalam interaksi antar manusia. Keadilan adalah tujuan dan misi utama kenabian, yaitu; mengajak manusia untuk menyembah Allah, sekaligus memberantas kemusyrikan, dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sekaligus memberantas kedlaliman (Q.S. Al-Hadid:25).

Dalam al-Qur'an Allah dikatakan Maha Adil, dan bahwa dia menegakkan keadilan atas dasar bahwa keadilan adalah sifat positif yang dimilikinya (Q.S. Ali Imran:14). Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa Allah menyuruh berbuat adil atau bahwa Dia adalah Pelaku keadilan. Pernyataan ini merupakan persoalan asasi yang diatasnya agama-agama samawi membangun hubungan manusia dengan Allah. Kemudian, perintah Tuhan untuk mendirikan keadilan yang didasarkan atas kualitas monoteistik prinsip keesaan Tuhan yang sesuai dengan ajaran Islam (tauhid). Penegakan keadilan adalah merupakan manifestasi perbuatan yang paling mendekati taqwa atau keinsyafan

ketuhanan dalam diri manusia (Q.S. Al-Maidah: 8).

Konsep keadilan yang menetapkan kesamaan derajat manusia yang dilandaskan atas kualitas ketaqwaan dapat memupuk persaudaraan kemanusiaan yang sangat kuat. Persaudaraan kemanusiaan, mewujudkan saling mengasihi manusia, perasaan cinta kebaikan, yaitu taqwa kepada Allah, melaksanakan hukum-hukumnya dan menjauhi larangannya, mendukung pertumbuhan secara menyeluruh bagi kemanusiaan.

Disinilah pentingnya keadilan dalam konteks globalisasi ekonomi, dimana aktivitas ekonomi dilaksanakan dengan adil antar sesama walaupun berbeda-beda bangsa, agama dan tingkat sosialnya. Dalam pandangan al-Qur'an perbedaan sesama manusia adalah suatu hal yang alami, juga sekaligus mengandung banyak manfaat. Sekalipun demikian manusia tetap tergolong ke dalam umat yang satu. Agama berfungsi untuk mengingatkan akan kesamaannya, sebagai landasan persahabatan, persaudaraan, dan tolong menolong dalam mewujudkan keadilan sosial (Qutb, 1994: 37). Sebaliknya ketidakadilan akan melemahkan solidaritas, meningkatkan konflik dan ketegangan, serta memperburuk permasalahan manusia.

Selain keadilan, yang perlu diterapkan dalam globalisasi ekonomi adalah pendekatan multidisiplin. Hal ini karena kehidupan manusia tidak hanya terdiri dari satu komponen yang terpisah dengan lainnya, melainkan seluruh aspek kehidupan manusia, moral, intelektual, sosial, sejarah, demografis, dan politik tersambung erat satu sama lainnya. Aspek-aspek tersebut mempengaruhi satu sama lain, sehingga

tidak membahas masalah ekonomi tanpa memasukkan aspek lainnya dalam kehidupan manusia. Walaupun, mungkin dapat diasumsikan beberapa variabel dari hasil analisis singkat, namun sangat tidak realistis untuk mengacuhkan aspek-aspek lainnya secara keseluruhan. Karena itu membahas globalisasi ekonomi juga harus mempertimbangkan multi variabel yang dapat mempengaruhinya.

Berikut beberapa variabel yang harus dibangun untuk mewujudkan globalisasi ekonomi yang adil:

Membangun Pondasi Keyakinan yang Kuat (Aqidah). Suatu aktivitas harus dilandasi oleh dasar keyakinan yang kuat. Dalam Islam semua kegiatan baik ibadah maupun muamalah harus bertolak dari aqidah yang benar dan kuat. Aqidah yang kuat tersebut adalah Tauhid yang dalam konsep ketuhanan berarti mengesakan Allah Swt. Konsepsi ini menuntut adanya kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan tanpa syarat. Dalam konsepsi ini, eksistensi manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah, yang akan berimplikasi pada aktivitas ekonomi yang tidak ada diskriminasi. Semua manusia sama, wajib dihormati dan diberikan hak-haknya.

Membangun Kekuatan Ilmu Pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak hanya dipahami sebagai hasil statis kegiatan ilmu pengetahuan berupa hukum dan teori ilmiah. Ilmu pengetahuan adalah juga sebuah proses, sebuah kegiatan dan sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang. Sehingga dalam ilmu pengetahuan, sering muncul sikap kritis yang ingin meragukan terus kebenaran yang telah ditemukan (Keraf dan Dua, 2001). Ketika dunia global sudah dimulai maka

semuanya harus mengikutinya sesuai dengan standard yang berlaku. Untuk itu diperlukan kemampuan dan keahlian tertentu agar dapat turut memberikan kontribusi sesuai dengan keahliannya.

- a. Membangun Kekuatan Ukhuwah dan Sinergi. Ukhuwah melahirkan kerukunan hidup dan kesetiakawanan sosial. Ukhuwah antar umat Islam tak akan berwujud tanpa silaturahmi. Komunitas Muslim tidak akan diperhitungkan keberadaannya jika tidak memelihara dan membangun jaringan silaturahmi (Chirzin, 2007). Lebih lanjut Chirzin (2007) menjelaskan lima dimensi dalam ukhuwah, yakni persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah insaniyah*); persaudaraan nasab dan perkawinan/semenda (*ukhuwah nasabiyah shihriyah*); persaudaraan suku dan bangsa (*ukhuwah sya'biyah wathaniyah*); persaudaraan sesama pemeluk agama (*ukhuwah diniyah*), persaudaraan seiman-seagama (*ukhuwah imaniyah*).
- b. Membangun Kekuatan Pendidikan dan Budaya. Pendidikan merupakan hak setiap individu dan budaya merupakan sesuatu yang diciptakan manusia melalui berbagai upaya yang dilakukan dalam pendidikan. Menurut Feisal (1995), pendidikan adalah salah satu unsur dari aspek sosial-budaya yang berperan sangat strategis dalam pembinaan suatu keluarga, masyarakat, atau bangsa. Kestrategisan peran ini pada intinya merupakan suatu *ikhtiar* yang dilaksanakan secara sadar, sistematis, terarah dan terpadu untuk memanusiaikan peserta didik serta menjadikan mereka *khalifah* di muka bumi.
- c. Menegakkan Keadilan. Hal ini penting karena keadilan menjadi suatu titik tolak dalam membangun kesejahteraan hidup. Dari sini akan muncul kedinamisan

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menanamkan Tanggung Jawab. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap pelaku ekonomi harus bertanggung jawab, baik dari sisi eksekusi (akibat) ataupun aktivitasnya kepada diri sendiri dan masyarakat ataupun bangsa. Demikian juga tidak diperbolehkan terjadi kerusakan ekologi sebagai akibat manfaat teknologi yang berlebihan. Prinsip ini muncul dalam rangka melakukan kritik dan solusi atas banyaknya kekurangan yang terdapat dalam ekonomi kapitalis.

Membangun kepribadian yang jujur (*Shiddiq*). *Shiddiq* adalah benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Larangan berdusta, menipu, mengurangi takaran timbangan dan mempermainkan kualitas jelas akan merusak perekonomian dan menyebabkan banyak kerugian. Dalam ekonomi Islam kerugian tidak hanya secara material di dunia saja, tetapi juga kerugian di akhirat dimana semuanya akan diperhitungkan di hadapan Tuhan.

Menumbuhkan Kecerdasan (*Fathanah*) yang dapat melahirkan sikap *kreatif, berani, dan percaya diri*. Seorang yang *fathanah* mampu mencari dan menemukan peluang-peluang bisnis yang baru, prospektif dan berwawasan masa depan, namun tidak mengabaikan prinsip kekinian. Hal ini hanya mungkin dapat dilakukan bila seorang pebisnis memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk berbuat sekaligus siap menanggung berbagai macam resiko. Sifat ketiga hal ini merupakan paduan antara amanah dan *fathanah* yang sering diterjemahkan dalam nilai-nilai bisnis dan manajemen yang bertanggung jawab, transparan, tepat waktu, memiliki

- manajemen bervisi, manajer dan pemimpin yang cerdas, sadar produk dan jasa serta belajar secara berkelanjutan.
- d. Membangun Kemampuan Komunikasi (*Tabligh*). Kemampuan komunikasi menjadi keniscayaan di dunia bisnis. Apalagi jika harus bekerja dengan banyak mitra usaha. Istilah ini juga diterjemahkan dalam bahasa manajemen sebagai supel, cerdas, dekripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, cepat tanggap, koordinasi, dan supervise.
 - e. Membangun Sikap Konsisten (*Istiqamah*). Hanya dengan konsistensi sebuah pekerjaan besar dapat diselesaikan. Begitu juga bisnis-bisnis besar, akan dapat dilaksanakan dengan sukses jika dilakukan secara konsisten (*istiqamah*). Tidak hanya untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga untuk membuka peluang-peluang bisnis yang prospektif dan menguntungkan.
 - f. Menghapuskan Riba dan Menjadikan Uang Sebagaimana Fungsinya. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang adalah sebagai alat tukar, penyimpan kekayaan dan penilai barang dan jasa. Oleh karena itu uang tidak boleh dijadikan media untuk memperoleh riba. Islam mengharamkan menimbun uang maupun barang (*At-Taubah*: 34-35) dan mengharamkan riba (*Al-Baqarah*: 278) karena itu akan membuat peredaran uang/barang macet (tertahan). Uang adalah barang publik, sedangkan *capital* adalah barang pribadi. *Money* adalah milik masyarakat, karenanya penimbunan dan dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Bila diibaratkan dengan darah, perekonomian akan kekurangan darah alias kelesuan ekonomi alias stagnansi. Hal seperti ini juga berlaku pada barang. Jika dilakukan penimbunan barang, maka persediaan

barang (penawaran) di pasar lebih sedikit dari jumlah permintaan yang nantinya akan berdampak pada kenaikan harga yang tajam. Bagi yang tidak dapat memproduktifkan *capital*-nya, Islam menganjurkan untuk melakukan *musyarakah* atau *mudharabah*. Islam sangat menganjurkan *qard*, yaitu meminjamkan *capital*-nya tanpa imbalan apapun: pinjam 10 juta, kembalikan 10 juta. Secara mikro, *qard* tidak memberikan manfaat langsung bagi orang yang meminjamkan, namun secara makro *qard* akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan diberikannya *qard*, *velocity of money* bertambah cepat. Bila ingin lebih jauh lagi, Islam menganjurkan sedekah yang dampaknya kurang lebih sama dengan *qard*.

Menghidupkan Ekonomi Sektor Riil. Ekonomi sektor riil adalah penggerak utama ekonomi. Telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi ketidakseimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan (*financial*), hal inilah yang mengakibatkan terjadinya berbagai krisis di dunia saat ini. Sektor riil inilah yang menjadi “ruh” dari sistem ekonomi Islam, karena melalui sektor riil, distribusi kesejahteraan berjalan sesuai dengan spirit keadilan.

PENUTUP

Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan, dimana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Globalisasi perekonomian ini berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa serta modal.

Menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antar Negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing Negara melalui spesialisasi produksi komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing Negara itu. Namun dalam kenyataannya tidaklah serta merta teori itu menciptakan kemakmuran bagi Negara-negara yang terlibat. Dampak dari globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu negara bisa positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut.

Bagi Negara-negara berkembang yang belum siap menghadapi globalisasi bisa menghambat pertumbuhan di sektor industri. Globalisasi ekonomi menyebabkan negara-negara berkembang tidak bisa lagi memakai tarif tinggi untuk memproteksi industri yang baru berkembang (*infant industry*). Sehingga, perdagangan luar negeri yang cukup bebas menimbulkan hambatan bagi negara berkembang dalam memajukan sektor *industry*. Selain itu, semakin meningkatnya ketergantungan pada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional.

Selain itu globalisasi juga dapat memperburuk neraca pembayaran.

Globalisasi ekonomi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, jika suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak akan berkembang. Kondisi ini dapat saja memperburuk neraca pembayaran. Efek buruk lain terhadap neraca pembayaran yakni pembayaran neto pendapatan untuk faktor produksi dari luar negeri cenderung mengakibatkan defisit. Bertambah banyaknya investasi asing menyebabkan arus pembayaran keuntungan (pendapatan) dari investasi ke luar negeri akan makin meningkat.

Negara-negara maju yang sekarang mengusung liberalisasi ekonomi sebenarnya pada awalnya juga lebih memilih memakai ekonomi merkantilis dan proteksionis daripada pasar bebas. Untuk itu NSB yang masih dalam tahap-tahap awal perkembangan dan pertumbuhan seharusnya tidak secara total menerapkan pasar bebas. Masih perlu menerapkan ekonomi yang proteksionis dan kerakyatan. Jika globalisasi ekonomi harus dilakukan, maka harus dilandasi dengan keadilan dan kesetaraan dalam interaksi antar manusia. Selain keadilan, yang perlu diterapkan dalam globalisasi ekonomi adalah pendekatan multidisiplin. Hal ini karena kehidupan manusia tidak hanya terdiri dari satu komponen yang terpisah dengan lainnya, melainkan seluruh aspek kehidupan manusia, moral, spiritual, intelektual, sosial, sejarah, demografis, dan politik tersambung erat satu sama lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Sritua. 1998. *Teori dan Kebijakan Pembangunan*, CIDES .
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN.
- Chapra, M. Umer. 1992. *Islam and The Economic Challenge* , Leicester, UK.:, The Islamic Foundation.
- Clements, Kevin P. 1999. *Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan*, terj. Endi Haryono, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, M. 1970. *Foreign Economic Aid : Means and Objective*, dalam T Baghwati dan R. Eckans (Ed), Foreign Aid, London: Penguin.
- George, Susan. 2000. "A Short History of Neoliberalism", dalam Walden Bello, Nicola Bullard, Kamal Malhotra (ed.), *Global Finance: New Thinking on Regulating Speculative Capital Markets*, Zed Books.
- Khor, Martin. 2002. "Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan", Seri Kajian Global, Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Mangkusuwondo, Suhadi. 1987. "Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro: Perspektif Indonesia", dalam Hendra Esmara (ed), *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.
- Martinez, Elizabeth, dan Arnoldo Garcia. 1998. "What is Neo-Liberalism?", Third World Resurgence No. 99/1998.
- Nayyar, D. 1997. *Globalization: The Past in Our Future*, Penang, Malaysia, Third World Network.
- Qutb, Sayyid. 1994. *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka.
- Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, terj. Cholish, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- T. Gilarso. 1992. *Pengantar Ilmu Ekonomi, Bagian Makro*, Yogyakarta : Kanisius.
- Todaro, MP. 1977. *Economic for Developing World*, London : Longman.
- Wahid, Hasyim, dkk. 1999. *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Yogyakarta LKiS.
- Wheelwright, Ted. 1998. "How Neo-Liberal Ideology Triumphed", Third World Resurgence, No. 99/1998.